

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Dewan Perwakilan Rakyat**

Berdasarkan konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945), Dewan Perwakilan Rakyat diwajibkan untuk melaksanakan tiga fungsi: Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dimana setiap Anggota Dewan wajib mengutamakan kepentingan rakyat yang diwakilinya (konstituen) sehingga menjadikan mereka “Wakil Rakyat”.

Jumlah anggota DPR RI periode 2014-2019 sebanyak 560 orang yang berasal dari 10 partai politik, yaitu partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP (109 kursi), Partai Golongan Karya atau Golkar (91 kursi), Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra (73 kursi), Partai Demokrat (61 kursi), Partai Amanat Nasional atau PAN (49 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB (47 kursi), Partai Keadilan Sejahtera atau PKS (40 kursi), Partai Persatuan Pembangunan atau PPP (39 kursi), Partai Nasional Demokrat atau Nasdem (35 kursi), dan Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura (16 kursi).

Representasi perempuan pada periode DPR 2014-2019 perempuan yang menjadi anggota DPR berjumlah 97 orang atau mencapai 17,32% dari total anggota dewan. representasi tersebut menurun jika dibanding dengan periode sebelumnya yang mencapai 18,4% atau 103 orang. Penurunan tingkat representasi ini perlu dicermati mengingat sejak pemilu 2004 upaya untuk meningkatkan keterampilan perempuan dalam lembaga legislatif melalui pengaturan kuota 30% untuk perempuan sesuai dengan undang-undang pemilu telah berhasil menambah jumlah perempuan yang duduk di DPR.

Usia anggota DPR pada periode 2014-2019 yang memiliki usia diatas 50 tahun sebanyak 240 orang atau 42,86%. artinya sekitar 320 orang atau 57,4% anggota DPR RI periode 2014-2019 didominasi oleh mereka yang berada pada kelompok usia produktif. Jika dilihat dari tingkat pendidikan sebagian besar anggota DPR RI periode 2014-2019 adalah lulusan perguruan tinggi

sekitar 84,4% yang terdiri atas 43,75% lulusan pascasarjana 42,4% lulusan sarjana dan 1,25% lulusan diploma. Sisanya sebesar 12,86% adalah lulusan SMA. Latar belakang pekerjaan atau profesi sebagian besar anggota DPR RI periode 2014-2019 berasal dari anggota DPR, DPD, atau DPRD sebanyak 40,5%. sebagian lainnya berasal dari kalangan swasta wiraswasta sebanyak 36,2%, dan 5% berasal dari Menteri atau kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Dalam periode keanggotaan DPR 2014-2019, merupakan wakil rakyat dari 77 Daerah Pemilihan (Dapil). Anggota Dewan yang terpilih bertugas mewakili rakyat selama 5 (lima) tahun, kecuali bagi mereka yang tidak bisa menyelesaikan masa jabatannya. Anggota Dewan yang berhenti di tengah-tengah masa jabatannya akan digantikan oleh Calon Legislator lain (yang mengikuti Pemilu Legislatif) melalui PAW (Pergantian Antar Waktu). Untuk dapat dipilih menjadi Anggota Dewan, calon legislator harus berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dengan latar belakang pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) dan merupakan Warga Negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani. Calon Anggota DPR juga diwajibkan berasal dari partai politik (tidak ada calon independen).

Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPR terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPR. Sedangkan Anggota Pengganti Antar Waktu, mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Pimpinan DPR, yang juga dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR. Tahun sidang DPR RI diawali setiap tanggal 16 Agustus dan diakhiri tanggal 15 Agustus tahun berikutnya. Artinya, awal tahun baru bagi Anggota Dewan adalah pada tanggal 16 Agustus. Hari permulaan Tahun Sidang dibuka dengan Pidato Kenegaraan Presiden dan dilanjutkan dengan Pidato Pembukaan Masa Persidangan I oleh Pimpinan DPR. Dalam satu tahun sidang, waktu kerja DPR dibagi menjadi empat atau lima masa persidangan. Dimana setiap masa persidangan terdiri dari masa sidang dan masa reses.

Masa sidang adalah masa dimana DPR bekerja di dalam gedung DPR. Pada masa ini, berbagai aktivitas dilakukan Anggota Dewan di dalam

kompleks gedung Senayan, mulai dari kegiatan rapat-rapat dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi (membentuk UU), fungsi anggaran (penetapan APBN), maupun fungsi pengawasan yang melibatkan rapat-rapat dengan pemerintah, sampai dengan kegiatan menerima dan memperjuangkan aspirasi rakyat, baik yang datang ke DPR secara individu maupun berkelompok (termasuk para demonstran). Sementara masa reses merupakan masa dimana para Anggota Dewan bekerja di luar gedung DPR, menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing. Pelaksanaan tugas Anggota Dewan di dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan dikenal dengan kunjungan kerja. Kunjungan kerja ini bisa dilakukan oleh Anggota Dewan secara perseorangan maupun secara berkelompok.

#### 4.1.1 Tugas dan Wewenang

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:

1. Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
2. Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
3. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah)
4. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
5. Menetapkan UU bersama dengan Presiden
6. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang:

1. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)
2. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama
3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK

4. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara
5. Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:
6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah
7. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama)

Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain:

1. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat
2. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
3. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain
4. Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
5. Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden
6. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden

#### 4.1.2 Hak dan Kewajiban Anggota

Selain wajib menjalankan tugas dan fungsinya, setiap Anggota Dewan juga memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing individu setiap wakil rakyat.

Hak Anggota DPR terdiri dari:

1. Hak mengajukan usul rancangan undang-undang;

2. Hak mengajukan pertanyaan;
3. Hak menyampaikan usul dan pendapat;
4. Hak memilih dan dipilih;
5. Hak membela diri;
6. Hak imunitas;
7. Hak protokoler;
8. Hak keuangan dan administratif;
9. Hak pengawasan;
10. Hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan dapil;
11. Hak melakukan sosialisasi undang-undang.

Kewajiban Anggota DPR adalah:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
5. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
6. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
7. Menaati tata tertib dan kode etik;
8. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
9. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
10. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
11. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Pembuatan Undang-Undang

1. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

2. Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD.
3. Rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi.
4. Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Presiden.
5. Rancangan undang-undang dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh DPD, dalam hal berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
6. Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dan disertai dengan naskah akademis, kecuali rancangan undang-undang mengenai:
  - a. APBN;
  - b. penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang; atau
  - c. pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
7. Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) disusun berdasarkan Prolegnas.
8. Dalam keadaan tertentu, hanya DPR dan Presiden yang dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas.
9. Rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama antara DPR dan Presiden paling lambat 7 (tujuh) Hari disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.
10. Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

#### 4.1.3 Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Setiap rapat DPR dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat (kuorum), apabila tidak tercapai, rapat ditunda sebanyak-banyaknya 2 kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 jam. Setelah 2 kali penundaan kuorum belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Bamus (apabila terjadi dalam rapat Alat Kelengkapan DPR), atau kepada Bamun dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi (apabila terjadi dalam rapat Bamus). Secara lengkap dapat dilihat pada Tata tertib DPR RI BAB XVII.

##### 1. Keputusan Berdasarkan Mufakat

Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada anggota rapat yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, dan dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan. Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang telah mencapai kuorum dan disetujui oleh semua yang hadir.

##### 2. Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain. Pengambilan keputusan secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan dan dilakukan secara tertutup apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dianggap perlu. Pemberian suara secara tertutup dilakukan dengan cara tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, fraksi pemberi suara atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan, atau dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan. Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah

apabila diambil dalam rapat yang telah mencapai kuorum dan disetujui oleh lebih separuh jumlah anggota yang hadir.

#### 4.1.4 Alat Kelengkapan DPR

##### 1. Pimpinan DPR

Terdiri dari Ketua DPR (Mempunyai tugas bersifat umum dan mencakup semua Bidang Koordinasi), Wakil Ketua DPR RI yang menjadi koordinator empat bidang, yakni :

- a. Bidang Politik dan Keamanan (KORPOLKAM) yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi I, Komisi II dan Komisi III, Badan Kerjasama Antar Parlemen, dan Badan Legislasi.
- b. Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (KOREKKU) yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi XI, Badan Anggaran dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.
- c. Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (KORINBANG) yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi IV, Komisi V, Komisi VI dan Komisi VII.
- d. Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (KORKESRA) yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X, Badan Urusan Rumah Tangga dan Mahkamah Kehormatan Dewan.

##### 2. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah anggota berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna. Ketua dan/atau sekretaris fraksi karena jabatannya menjadi anggota Badan Musyawarah. Pimpinan DPR karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan dalam hal ini Pimpinan DPR tidak merangkap sebagai anggota dan tidak mewakili fraksi.



Badan Musyawarah bertugas

- a) Menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
- b) Memberikan pendapat kepada pimpinan DPR dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPR;
- c) Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPR yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- d) Mengatur lebih lanjut penanganan suatu masalah dalam hal undang-undang mengharuskan Pemerintah atau pihak lainnya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPR;
- e) Menentukan penanganan suatu rancangan undang-undang atau pelaksanaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR;
- f) Mengusulkan kepada rapat paripurna mengenai jumlah komisi, ruang lingkup tugas komisi, dan mitra kerja komisi yang telah dibahas dalam konsultasi pada awal masa keanggotaan DPR; dan
- g) Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

### 3. Komisi DPR

Susunan dan keanggotaan komisi ditetapkan oleh DPR dalam Rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang. Setiap Anggota, kecuali Pimpinan MPR dan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi. Jumlah Komisi, Pasangan Kerja Komisi dan Ruang Lingkup Tugas Komisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPR yang didasarkan pada institusi pemerintah, baik lembaga kementerian negara maupun

lembaga non-kementerian, dan sekretariat lembaga negara, dengan mempertimbangkan keefektifan tugas DPR.

Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya. Tugas Komisi di bidang anggaran lain:

- a) mengadakan Pembicaraan Pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah; dan
- b) mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah.

Tugas komisi di bidang pengawasan antara lain:

- a) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya;
- b) membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya;
- c) melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; serta
- d) membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.

Komisi dalam melaksanakan tugasnya dapat: mengadakan Rapat kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri; mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili intansinya, mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, mengadakan kunjungan kerja dalam Masa Reses.

#### 4. Badan Legislasi

Badan Legislasi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang dan setiap masa sidang. Jumlah anggota

Badan Legislasi paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota komisi, yang mencerminkan Fraksi dan komisi. Untuk Periode 2019-2024 Badan Legislasi memiliki anggota yang mewakili dari seluruh fraksi.

Pembentukan Badan Legislasi DPR pertama kali (Tahun 1999) melalui Peraturan DPR tentang Tata Tertib DPR RI yang ditetapkan pada tanggal 23 September 1999, dasar hukum Badan Legislasi :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
- e) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
- f) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri atas 1 (satu) orang

ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Adapun Anggota Badan Legislasi DPR RI Periode 2019-2024 sebanyak 80 (delapan puluh) orang yang mewakili Fraksi-Fraksi.

Tugas Badan Legislasi (berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD), sebagai berikut :

- a) menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;
- b) mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan Prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah dan DPD;
- c) mengoordinasikan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, dan gabungan komisi;
- d) menyiapkan dan menyusun rancangan undang-undang usul Badan Legislasi dan/atau Anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- e) melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi, sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR;
- f) memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional perubahan;

- g) melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan
- h) rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- i) melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang
- j) menyusun, melakukan evaluasi, dan penyempurnaan peraturan DPR;
- k) mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- l) melakukan sosialisasi program legislasi nasional dan/atau Prolegnas perubahan;
- m) membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan setiap akhir tahun sidang untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR; dan
- n) membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, Badan Legislasi memiliki wewenang antara lain :

- a) Melakukan kunjungan kerja pada masa rese atau pada masa sidang dengan persetujuan Pimpinan DPR;
- b) Mengadakan rapat koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus yang mendapat penugasan membahas rancangan undang-undang, yang hasil rapatnya diinventarisasi dan dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan prolegnas;
- c) Melakukan inventarisasi dan evaluasi dengan mempertimbangkan pelaksanaan:
- d) Prolegnas satu masa keanggotaan;
- e) RUU Prioritas Tahunan;
- f) Penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang dalam satu masa keanggotaan;

- g) Jumlah rancangan undang-undang yang belum dapat diselesaikan; serta
- h) Masalah hukum dan perundang-undangan.

#### 5. Badan Anggaran

Badan Anggaran dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang. Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran terdiri atas anggota dari tiap-tiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi. Sedangkan Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh komisi. Anggota komisi dalam Badan Anggaran harus mengupayakan alokasi anggaran yang diputuskan komisi dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas.

Badan Anggaran bertugas:

- a) membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran;
- b) menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi terkait;
- c) membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi

anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga;

- d) melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;
- e) membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN; dan membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

#### 6. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)

BURT dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BURT pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota BURT ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang dijabat oleh ketua DPR dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

BURT bertugas:

- a) menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR;
- b) melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR;
- c) melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan alat kelengkapan MPR yang berhubungan dengan masalah

kerumahtanggaan DPR, DPD, dan MPR yang ditugaskan oleh pimpinan DPR berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah;

- d) menyampaikan hasil keputusan dan kebijakan Badan Urusan Rumah Tangga kepada setiap anggota; dan
- e) menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu.

#### 7. Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP)

BKSAP adalah Alat Kelengkapan Dewan yang dibentuk untuk menjadi ujung tombak diplomasi parlemen. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), BKSAP mempunyai fungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen. BKSAP juga menyampaikan saran atau rekomendasi kepada Pimpinan DPR terkait masalah kerja sama antar-parlemen.

Ketika menghadiri berbagai sidang baik di kawasan maupun di forum internasional, BKSAP menyuarakan kepentingan nasional Indonesia dan memperjuangkan berbagai resolusi yang bermanfaat bagi kepentingan publik. Selain kiprah di luar negeri, BKSAP menerima kunjungan delegasi parlemen negara sahabat yang menjadi tamu DPR dan menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang regional/internasional. BKSAP juga membentuk panitia kerja untuk menindaklanjuti isu-isu yang menjadi perhatian BKSAP, terutama yang berkaitan dengan pencapaian Sustainable Development Goals dan peningkatan kerja sama ekonomi regional. Dalam hubungan bilateral, BKSAP juga menjalin hubungan dengan parlemen negara lain dengan membentuk Grup Kerja Sama Bilateral serta menjaga



hubungan baik dengan berbagai negara melalui pertemuan-pertemuan dengan duta besar negara sahabat.

Dalam menjalankan peran diplomasi parlemen ini, BKSAP selalu berupaya untuk berperan aktif dalam forum antar-parlemen baik regional maupun multilateral yang diikuti serta mengupayakan untuk dapat menduduki berbagai posisi strategis di organisasi parlemen regional/multilateral serta mengembangkan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan menghadiri sidang/pertemuan internasional. BKSAP adalah pintu DPR ke dunia internasional yang dapat memberikan perspektif baru dari sisi aspirasi konstituen yang diawali oleh anggota parlemen dan memberikan ruang bagi peningkatan fungsi parlemen di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran dalam menghadapi tantangan global yang bersifat lintas batas. BKSAP terdiri dari 4 (empat) Desk, yakni: Desk Kerjasama Internasional, Desk Kerjasama Regional, Desk Kerjasama Bilateral dan Desk Kegiatan Administrasi Luar Negeri Anggota.

#### 8. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

BAKN, disusun untuk meningkatkan peran, fungsi dan tanggung jawab lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, lembaga perwakilan daerah, sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat (1) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam rangka meningkatkan penguatan dan pengefektifan kelembagaan DPR RI serta mendukung tugas dan wewenang DPR RI khususnya dalam fungsi pengawasan, maka dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tersebut, pada pasal 112A sampai dengan pasal 112G, telah dibentuk Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang ditetapkan menjadi salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI pada periode 2014-2019.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara sebagai alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap, dalam hal pengawasan

penggunaan keuangan negara berfungsi untuk melakukan telaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Oleh karena itu, diharapkan keberadaan BAKN akan berkontribusi positif dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara serta menjaga kredibilitas atau kepercayaan publik/masyarakat DPR RI khususnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan dewan. Adapun penetapan anggota BAKN periode 2014-2019 telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 26 April 2018. Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas serta wewenang BAKN DPR RI sebagai lembaga yang baru dibentuk, maka harus dapat menjaga kredibilitas atau kepercayaan publik/masyarakat dalam melaksanakan fungsi pengawasan Dewan.

#### 9. Mahkamah Kehormatan Dewan

MKD dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan berjumlah 17 (tujuh belas) orang dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Tata cara pelaksanaan tugas Mahkamah Kehormatan Dewan diatur dengan Peraturan DPR RI tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan.

#### 10. Panitia Khusus

Panitia khusus dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan oleh rapat paripurna paling banyak 30 (tiga puluh) orang. Pimpinan panitia khusus merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan jumlah panitia khusus yang ada serta keterwakilan perempuan menurut pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan panitia khusus mengajukan satu nama calon pimpinan panitia khusus kepada pimpinan DPR untuk dipilih dalam rapat panitia khusus.

Pemilihan pimpinan panitia khusus dilakukan dalam rapat panitia khusus yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan panitia khusus. Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna dan dapat diperpanjang oleh Badan Musyawarah apabila panitia khusus belum dapat menyelesaikan tugasnya. Panitia khusus dibubarkan oleh DPR setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.

#### **4.2 Visi DPR 2014-2019**

DPR RI sebagai lembaga negara memiliki beberapa karakteristik. Pertama lingkungan DPR RI merupakan lingkungan politik sehingga segala sesuatu mudah untuk dipolitisasi. Kedua heterogenitas pekerja atau pegawai yang ada di lingkungan DPR RI yang diperlihatkan dengan adanya beberapa jenis pekerja yaitu pegawai negeri sipil atau PNS pegawai tidak tetap seperti honorer, tenaga ahli dan staf administrasi. perbedaan ini berpengaruh

terhadap pola pengelolaan dan interaksi antar pegawai. Ketiga, meningkatnya kepentingan masyarakat terhadap aktivitas DPR RI.

Dalam mewujudkan kelembagaan demokrasi yang kuat, dewan perwakilan Rakyat republik Indonesia dituntut memiliki visi dan misi yang terangkum dalam suatu dokumen perencanaan. Karena menyadari bahwa dokumen perencanaan sebagai akuntabilitas publik merupakan hal yang sangat penting DPR periode 2009-2014 menyusun rencana strategi DPR RI 2010-2014. Rencana strategis yang diberlakukan pada DPR RI periode 2009-2014 ini merupakan sesuatu hal yang baru karena DPR pada era sebelumnya tidak pernah memiliki dokumen Renstra. keberadaan Renstra DPR RI 2010-2014 mencerminkan bahwa DPR RI merupakan lembaga negara yang menjalankan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Fokus kegiatan yang dilakukan DPR RI periode 2010-2014 tidak terlepas dari tugas konstitusional yang diamanatkan dalam UUD tahun 1945 yaitu pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Renstra DPR 2010-2014 merupakan dokumen yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan DPR periode 5 tahun dari tahun 2010 sampai 2014. Renstra ini ditetapkan dengan maksud memberi arah dan menjadi pedoman bagi segenap unsur yang ada dalam lingkungan DPR RI untuk menyusun rencana kerja dan rencana anggaran tahunan. Pada praktiknya pelaksanaan seluruh kegiatan yang terdapat dalam dokumen Renstra tidaklah mudah karena setiap kegiatan yang direncanakan memiliki target penyelesaian yang harus dicapai dan terukur sementara lembaga DPR merupakan lembaga politik yang sangat dinamis. Oleh sebab itu, setelah memasuki tahun kelima, masih ditemukan berbagai persoalan dalam pelaksanaan Renstra DPR RI 2010-2014 terutama yang terkait dengan pencapaian target yang telah direncanakan.

Berdasarkan hal tersebut DPR RI periode 2009-2014 telah melakukan evaluasi terhadap peran DPR RI 2010-2014. hasil evaluasi tersebut menjadi salah satu landasan bagi DPR RI periode 2014-2019 dalam menyusun Renstra DPR RI 2015-2019. selanjutnya rencana strategis DPR RI 2015-2019 disusun

dalam rangka penyempurnaan terhadap berbagai upaya perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Dokumen ini memadukan beberapa gagasan yang dihasilkan pada periode sebelumnya yang dinilai yang masih relevan dengan perkembangan tuntutan dan visi DPR RI periode 2015-2019. Hal utama yang ingin dicapai dalam Renstra DPR RI 2015-2019 dalam konteks perencanaan adalah bagaimana DPR RI pada periode 2015-2019 merencanakan program program reformasi kedewanan guna memperkuat kelembagaan DPR RI sebagai penyeimbang pemerintah melalui pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya serta menjadikan DPR sebagai lembaga yang modern dan merupakan perwujudan representasi rakyat. DPR yang modern selalu menjunjung aspek transparansi dan menggunakan teknologi informasi.

Visi DPR RI yang menjadi acuan dalam persiapan rencana strategis 2015-2019 adalah terwujudnya DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang modern, berwibawa, dan kredibel. Lembaga perwakilan yang modern mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DPR RI menginginkan adanya transparansi yang didukung oleh teknologi informasi dan membuka ruang partisipasi publik serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat. Lembaga perwakilan yang berwibawa mempunyai makna bahwa DPR RI menginginkan perilaku yang berpengaruh positif terhadap semua pihak dan disegani, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan demikian, DPR RI diharapkan dapat menjadi pusat pembelajaran dan pengetahuan serta menjadi center point demokrasi bagi bangsa Indonesia. lembaga perwakilan yang kredibel mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI mengedepankan kualitas yang didukung dengan kapabilitas sehingga akan menimbulkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pihak yang dipresentasikan. Misi DPR RI dirumuskan sebagai berikut 1. menyelenggarakan fungsi DPR RI untuk mendukung pembangunan nasional dalam rangka representasi rakyat dan 2. Memperkuat kelembagaan DPR RI sebagai penyeimbang pemerintah. visi dan misi DPR RI pada hakikatnya nya memberikan arah dalam perwujudan DPR RI yang berdasarkan Pancasila dan

undang-undang dasar 1945. Berdasarkan visi dan misi DPR RI dan sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional jangka panjang serta untuk mencapai visi dan misi tersebut tujuan strategis DPR RI 2014-2019 diarahkan pada pencapaian 2 tujuan pokok yaitu (a) mewujudkan penyelenggaraan fungsi legislasi anggaran dan pengawasan yang mendukung pembangunan serta mewujudkan kelembagaan DPR RI yang kuat diiringi dukungan administratif teknis dan keahlian unsur penunjang yang profesional.

Ketua DPR RI 2018-2019 Bambang Soesatyo mengatakan, sebagai rumah rakyat, sejatinya DPR RI harus terbuka dan melibatkan masyarakat dalam berbagai kesempatan. DPR ingin terus membumi dengan rakyat dan bersama-sama merasakan kegirangan. Melibatkan masyarakat adalah bagian dari partisipasi politik yang lumrah dalam demokrasi. Sebab tanpa dukungan rakyat, keputusan DPR RI tidak akan punya makna sama sekali. Sesuai UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), telah terjadi penguatan terhadap berbagai tugas dan fungsi DPR RI saat ini. Penguatan tersebut dilakukan guna mengawal proses check and balances dalam hubungan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sehingga, dapat menghindari terjadinya abuse of power dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Perubahan lainnya yang terjadi, selain tiga fungsi yang sudah dimiliki berupa legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR saat ini mendapatkan dua fungsi tambahan, yaitu diplomasi dan representasi. Penambahan dua fungsi tersebut membuat DPR RI semakin berlari kencang dalam menyongsong perubahan zaman. Khususnya, menyikapi dinamika politik global dan kehidupan sosial masyarakat di berbagai daerah. Parlemen sebagai bagian dari entitas politik negara juga harus berperan dalam perancangan diplomasi politik luar negeri pemerintah, terutama dalam membantu mewujudkan dunia yang lebih damai, adil, dan berkeadaban.

Sedangkan fungsi representasi dilakukan untuk menyerap dan menghimpun aspirasi rakyat melalui kunjungan kerja, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban secara moral maupun politik kepada konstituen di daerah pemilihannya. Semakin membaiknya konsolidasi demokrasi dan kelembagaan politik yang sudah dilakukan, perlu juga

mendapat dukungan dari perguruan tinggi. Dukungan bisa dilakukan dengan memberikan apresiasi maupun saran dan kritik yang membangun.

Begitu dilantik sebagai Ketua DPR RI, Bamsoet, sapaan Bambang bertekad segera mewujudkan DPR RI sebagai parlemen modern. Tujuannya, agar DPR RI tidak kalah dengan parlemen negara lain serta tertinggal perkembangan zaman. Berbagai perbaikan akan terus dilakukan untuk menuju Parlemen Modern sesuai dengan perkembangan dan kondisi zaman now. DPR zaman now sangat berbeda dengan DPR zaman old. DPR zaman now adalah parlemen yang menerapkan transparansi, teknologi informasi dan representasi. Seluruh kegiatan DPR dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat melalui aplikasi online.

Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC) Ahmad Hanafi mengatakan, DPR RI memang menetapkan transparansi sebagai salah satu indikator parlemen modern dalam Rencana Strategis DPR RI 2015– 2019. Indikator lainnya adalah, peningkatan representasi, dan penggunaan teknologi informasi. Menurutnya, indicator modern mengacu pada sarana (termasuk di dalamnya penggunaan teknologi informasi), tools, metode, dan manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsi DPR serta respon kelembagaan terhadap inisiatif-inisiatif global. Sementara transparansi dan representasi merupakan prinsip dasar pengelolaan lembaga perwakilan. Jadi, bisa saja sebuah lembaga perwakilan telah transparan dan representatif, tapi tidak modern. Pun sebaliknya.

Ukuran modernitas sendiri tergantung pada perkembangan zaman. Sebagai contoh, hari ini menggunakan situs (web), belum dikatakan modern jika belum menyajikan format data terbuka (open data) berbasis web 2.0 atau transisi web. 3.0, atau jika informasi yang dicari tidak dapat ditemukan dalam 13 detik. Nah, idealnya, kita beranjak pada tahap modernisasi sarana itu, jika telah membenahi kearsipan, keterbukaan informasi, dan tata kelola aparatur (birokrasi).

Menurut Hanafi, dengan perkembangan teknologi yang sedemikian pesat, maka prinsip “quod omnes tangit”, perlu melibatkan masyarakat secara lebih luas. Secara regulasi, ada banyak UU yang menjamin

transparansi dan partisipasi dalam pembahasan kebijakan, peraturan perundangan, dan penganggaran, antara lain UU: No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 43 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada tahun sidang ketiga 2016- 2017, DPR telah mengalami sejumlah kemajuan dalam transparansi legislasi secara pro-aktif (pro-active disclosure). Mengacu pada situs DPR RI, ada sejumlah RUU yang dokumen pembahasannya telah diumumkan secara pro-aktif, seperti RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dan RUU tentang Arsitek, dan lain-lain.

#### **4.3 Sekilas Aplikasi DPR Now**

Pertama kali diluncurkan pada Rabu, 29 Agustus 2018 silam, oleh Ketua DPR RI saat itu Bambang Soesatyo. Aplikasi DPR Now yang bisa diunduh melalui smartphone ini, merupakan salah satu perwujudan menuju parlemen modern. Dengan pemanfaatan kecanggihan teknologi digital, DPR RI bisa hadir di tengah-tengah rakyat. Aplikasi ini menampilkan aktivitas DPR dari Komisi I-XI juga menyaksikan dengan langsung kritik yang dilayangkan DPR RI terhadap pemerintah dalam rangka melakukan fungsi pengawasan. Melalui aplikasi DPR Now! berbagai program dan fungsi yang telah dijalankan oleh DPR RI bisa disosialisasikan dan diinformasikan kepada publik. Pun sebaliknya, publik bisa melihat setiap aktivitas dan denyut nadi kegiatan para wakil rakyatnya di DPR RI. Bahkan berbagai sidang maupun kegiatan kedewanan bisa dilihat secara real time di DPR Now!.

Hingga 31 Maret 2019, jumlah pengunduh aplikasi DPR Now! mencapai 9.435 user. Sedangkan member yang melengkapi data diri menembus 1.115 member dengan rincian perempuan 900 akun (80,77 persen) dan laki-laki 215 akun (19,23 persen). Sama halnya seperti platform media sosial seperti Instagram, Facebook, maupun Twitter, pendaftar aplikasi DPR Now! juga diminta mengisi berbagai kelengkapan data diri. Hal ini agar



memudahkan DPR RI dalam menindaklanjuti aduan yang disampaikan. Sehingga, terjalin komunikasi dua arah antara DPR RI dengan masyarakat dan sebaliknya. Berbagai aduan yang masuk ke aplikasi DPR Now! pada Maret 2019, paling banyak ditujukan kepada Komisi X DPR RI sebanyak 16 aduan. Disusul Komisi I, II dan III DPR RI dengan masing-masing 4 aduan.

#### **1.4 Hasil Penelitian**

Peneliti memilih menggunakan Teori Inovasi menurut Rogers dalam Yogi Suwarno (2016), untuk mengetahui Inovasi DPR RI dalam Mewujudkan Parlemen Modern yakni, Keuntungan Relatif (Relative Advantage), Kesesuaian (Compatibility), Kerumitan (Complexity), Kemungkinan Dicoba (Triability), dan Kemudahan diamati (Observability). Peneliti telah melakukan wawancara terhadap 7 (tujuh) informan yang terdiri dari Ketua DPR RI (2018-2019) Bambang Soesatyo (informan 1) yang kini menjabat sebagai Ketua MPR RI, anggota DPR RI Novita Wijayanti (informan 2) yang juga pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (informan 3), Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar (informan 4), dua tokoh yang merupakan pemerhati parlemen Lucius Karus (informan 5) yang merupakan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) dan Ferdian Andi (informan 6) yang merupakan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum. Satu lagi unsur masyarakat Tri Mujoko Bayuaji (informan 7). Karena masa pandemic Covid-19, wawancara dilakukan melalui layanan WhatsApp.

##### **a. Keuntungan Relatif**

Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain. Informan 1 begitu dilantik sebagai Ketua DPR RI bertekad segera mewujudkan DPR RI sebagai parlemen modern. Tujuannya, agar DPR RI tidak kalah dengan parlemen negara lain serta tertinggal perkembangan zaman. Berbagai perbaikan akan terus

dilakukan untuk menuju Parlemen Modern sesuai dengan perkembangan dan kondisi zaman now. DPR zaman now adalah parlemen yang menerapkan transparansi, teknologi informasi, dan representasi.

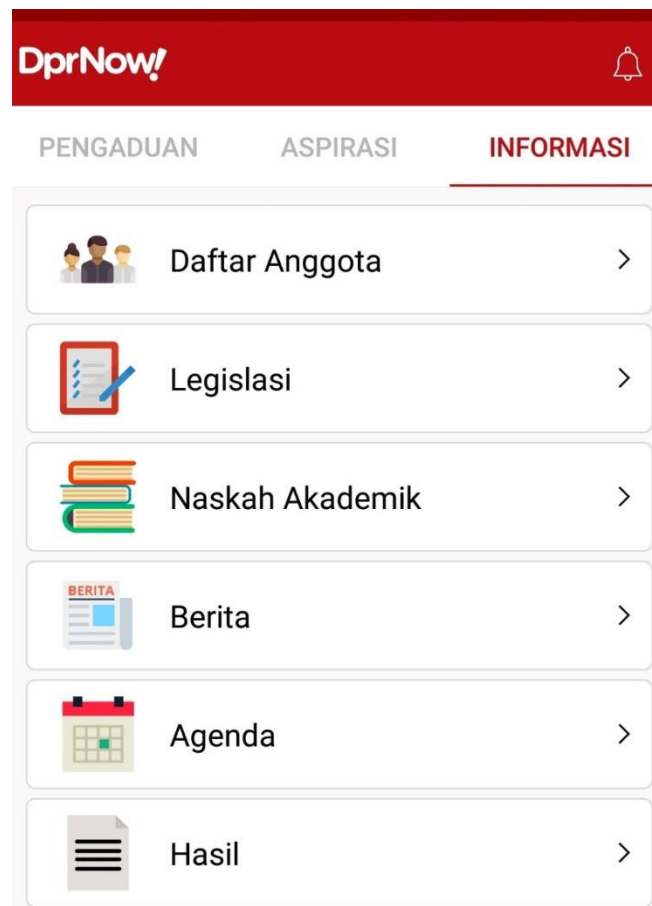
“Seluruh kegiatan DPR dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat melalui aplikasi online.” (Bambang Soesatyo, 16 September 2020)

Sementara, informan 2, dalam wawancara pada 17 September 2020 menambahkan, konsep parlemen modern merupakan Bagian dari Rencana Strategis DPR RI yang bertujuan untuk meningkatkan dan memudahkan kinerja anggota DPR RI. Begitu juga informan 3 pada wawancara tanggal 18 September 2020 mengakui Parlemen Modern memang memudahkan kinerja anggota DPR RI. Sistem digitalisasi alat komunikasi semisal akan mempermudah akses anggota dewan terhadap informasi.

Informan 4 memaparkan, Parlemen modern akan sangat memudahkan kinerja Anggota DPR, tidak saja sangat memudahkan kinerja Anggota DPR, tetapi secara kelembagaan DPR RI akan sangat dimudahkan untuk mencapai kinerja yang baik. Secara umum, para Anggota DPR RI akan lebih dekat dengan konstituennya mengingat hambatan jarak dan waktu dapat diatasi dengan penggunaan teknologi informatika yang menjadi prasyarat parlemen modern.

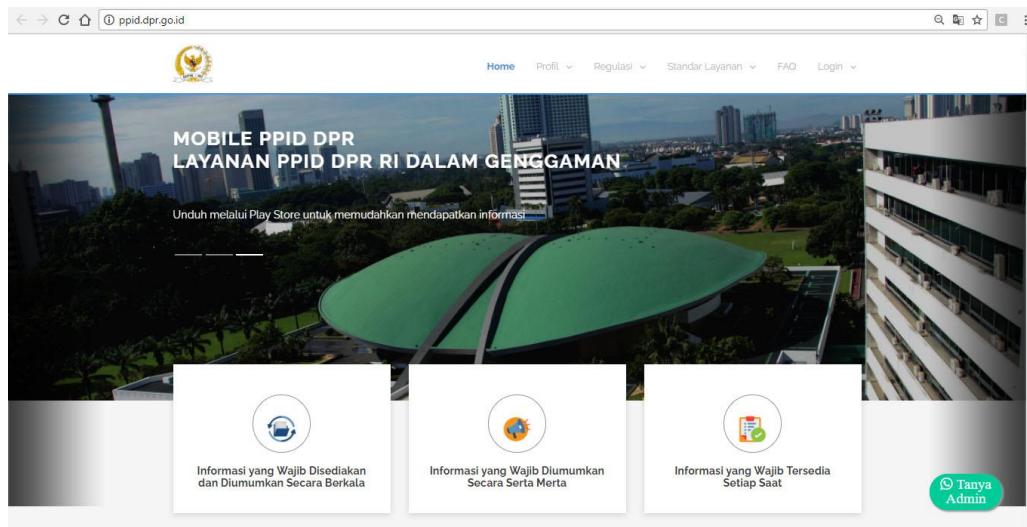
“Demikian juga DPR sebagai lembaga perwakilan, penggunaan teknologi informasi akan memudahkan DPR RI menjalankan ketiga fungsinya dalam kerangka representasi melalui kemudahan menjaring aspirasi, dan mengartikulasikannya di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.” (Indra Iskandar, 17 September 2020)

Peneliti menyoroti aplikasi DPR Now yang digunakan sebagai salah satu media komunikasi antara kegiatan kedewanan dengan masyarakat. Aplikasi tersebut dapat diunduh di telepon pintar atau smartphone.



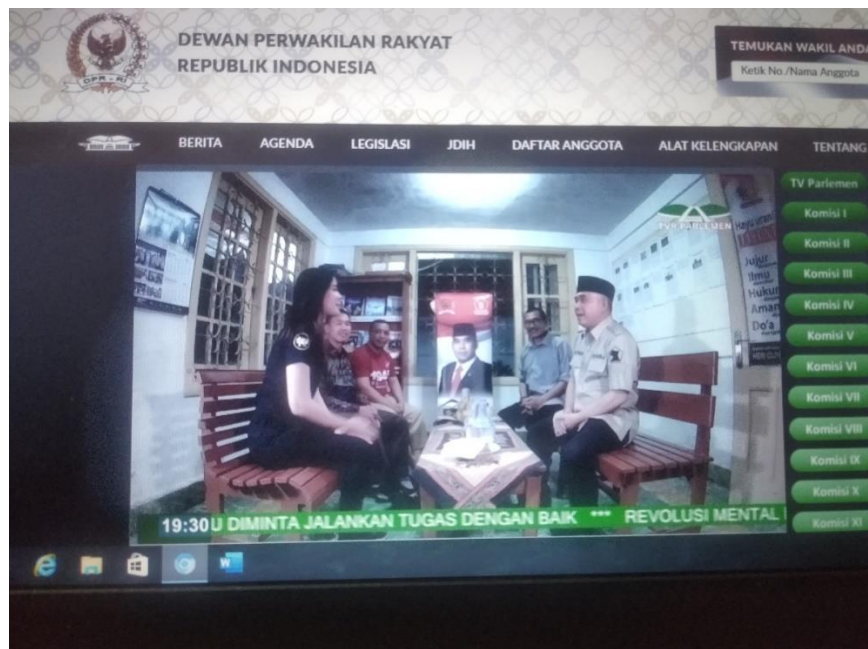
Gambar 4.1 aplikasi DPR Now (peneliti 2020)

Dalam laman resmi [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) peneliti juga menemukan mobile PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) DPR RI yang memuat layanan PPID dalam genggamannya. Ada tiga kanal pada layanan PPID, yakni Informasi Publik Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik Wajib Disediakan dan Diumumkan Serta Merta, dan Informasi Publik Wajib Disediakan dan Diumumkan Setiap Saat. Informasi Publik Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala merupakan informasi tentang profil DPR, seperti gambaran umum, profil pimpinan, tugas dan wewenang dan lainnya. Sedangkan Informasi Publik Wajib Disediakan dan Diumumkan Serta Merta disebut sebagai informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Dan terakhir Informasi Publik Wajib Disediakan dan Diumumkan Setiap Saat meliputi Daftar Informasi Publik dan informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan DPR RI.



Gambar 4.2 salah satu layanan di laman [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) (tangkapan gambar peneliti)

Laman resmi DPR RI juga memuat kegiatan anggota DPR, tidak hanya di lingkungan Gedung DPR RI. Melainkan juga aktivitas kedewanan di daerah pemilihan anggota DPR.



Gambar 4.3 Peneliti, 2020

Informan 7, Tri Mujoko Bayuaji, yang diwawancara 16 September 2020, yakin jika parlemen modern memudahkan kinerja anggota DPR RI. Namun ada catatan dari informan 5 yang mengatakan, Parlemen modern ini tak cuma sekedar ditandai dengan kehadiran perangkat-perangkat teknologi saja. Akan tetapi harusnya menjadi sebuah paradigma berpikir parlemen dalam menjalankan pekerjaan. Sejauh ini kemajuan teknologi memang sudah mulai terlihat di parlemen, tetapi berbagai teknologi yang dihadirkan itu tak berdampak pada membaiknya kinerja parlemen. Kehadiran aplikasi DPR Now maupun aplikasi DPR lainnya tak memberikan warna berbeda pada DPR khususnya terkait dengan kinerja. Menurut Lucius, semuanya sama saja seperti dulu saat DPR masih lebih banyak menggunakan perangkat teknologi manual. Idealnya parlemen modern memberikan dampak positif pada kinerja DPR jika kehadiran teknologi selaras dengan perubahan pola pikir atau paradigma berpikir parlemen.

“Ini artinya hanya modernisasi teknologi saja tanpa diikuti perubahan paradigma berpikir.” (Lucius Karus, 16 September 2020)

Informan 6 juga menilai, parlemen modern yang dicetuskan DPR hanya sekedar formalitas. Modernitas DPR kalau hanya dalam perspektif penggunaan digital tentu tidaklah cukup.

“Parlemen Modern harus dimaknai secara luas dan komprehensif. Nyatanya kerja DPR seperti pada umumnya saja, sama sebelum peluncuran Parlemen Modern.” (Ferdian Andi, 18 September 2020)

Meski begitu informan 1 tetap menyakini kehadiran parlemen modern bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Informan 1 yang kini menjabat sebagai Ketua MPR RI menyatakan, DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat dituntut untuk responsif terhadap berbagai perubahan di masyarakat.

“Salah satu hal penting yang secara global disadari oleh parlemen di dunia adalah pemanfaatan teknologi untuk membangun komunikasi interpersonal yang lebih baik dan demokratis dengan masyarakat.” (Bambang Soesatyo, 16 September 2020).

Begitu juga dengan informan 2 menambahkan, untuk realisasi dari program parlemen modern saat ini yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah terkait dengan keterbukaan informasi publik dan media parlemen.

“Kemudahan akses terhadap data, jadwal dan kegiatan anggota.”  
(Novita Wijayanti, 17 September 2020)

Adapun informan 3 mengatakan, salah satu implementasi dari parlemen modern adalah terbangunnya parlemen terbuka (open parliament). Ada 3 (tiga) asas dalam parlemen terbuka yaitu keterbukaan informasi publik, keterwakilan masyarakat dan akuntabilitas.

“Maka hal yang penting akan dirasakan masyarakat dengan penerapan parlemen modern adalah terjaminnya hak hak partisipasi masyarakat untuk dapat mengakses sumber informasi di DPR RI.  
(Fahri Hamzah, 18 September 2020)

Informan 4 juga memaparkan, hal penting yang akan dirasakan oleh masyarakat ketika DPR RI menjadi Parlemen Modern adalah tingkat keterwakilan masyarakat akan semakin baik, mengingat ciri-ciri parlemen modern salah satunya adalah adanya keterbukaan, transparansi, dan representasi atau keterwakilan.

“Keterbukaan dan transparansi akan memainkan peran penting bagaimana masyarakat mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh para wakilnya di parlemen, dan di sisi lain masyarakat akan lebih dapat secara aktif turut serta atau berpartisipasi dalam proses-proses politik di parlemen.” (Indra Iskandar, 17 September 2020)

Peneliti mencoba mengakses laman resmi [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) untuk mengikuti sidang atau rapat di DPR yang bersifat terbuka secara langsung.



Rapat yang disiarkan langsung TV Parlemen melalui [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)  
(tangkapan gambar 4.4 peneliti 2020)

Informan 7 sebagai masyarakat juga mengaku merasakan pelaksanaan parlemen modern.

“Akses langsung ke persidangan-persidangan secara online.” (Tri Mujoko Bayu Aji, 16 September 2020)

Meski begitu, informan 5 tetap berpendapat, tidak ada efek juga bagi publik dengan kehadiran konsep parlemen modern.

“DPR justru terlihat semakin terasing dari pemilihnya ketika mereka berlindung dibalik perangkat teknologi. (Lucius Karus, 16 September 2020)

Hal yang senada disampaikan informan 6, yang menyebut, biasa saja yang dirasakan masyarakat, tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah pengumuman Parlemen Modern.

### Intisari Diskripsi Dimensi Keuntungan Relatif / Relative Advantage

Indikator	Sumber			
	Wawancara	Observasi	Dokumentasi	Simpulan
Keuntungan Relatif (Relative Advantage)	Parlemen Modern merupakan parlemen yang menerapkan transparansi, teknologi informasi, dan representasi. Seluruh kegiatan DPR dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat melalui aplikasi online dan Sistem digitalisasi alat komunikasi semisal akan mempermudah akses anggota dewan terhadap informasi. Sesungguhnya konsep parlemen	Dalam laman resmi <a href="http://www.dpr.go.id">www.dpr.go.id</a> peneliti menemukan mobile PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan aplikasi DPR Now, keduanya merupakan upaya pewujudan Parlemen Modern yang memudahkan masyarakat mengakses kegiatan anggota DPR.	Visual atau informasi kegiatan anggota DPR di laman resmi DPR dan aplikasi DPR Now	Berdasarkan data yang diperoleh dari dimensi Keuntungan Relatif / Relative Advantage dalam inovasi DPR meweujudkan Parlemen Modern cukup baik. Banyak cara, baik anggota DPR maupun masyarakat memanfaatkan teknologi informasi yang mempermudah akses kedua pihak.



	<p>modern merupakan bagian dari Rencana Strategis (renstra) DPR RI periode 2014-2019 untuk memudahkan kinerja anggota DPR RI. parlemen modern adalah terjaminnya hak hak partisipasi masyarakat untuk dapat mengakses sumber informasi di DPR RI. Keterbukaan dan transparansi akan memainkan peran penting bagaimana masyarakat mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh para wakilnya di parlemen, dan di sisi lain</p>			
--	--	--	--	--

	<p>masyarakat akan lebih dapat secara aktif turut serta atau berpartisipasi dalam proses-proses politik di parlemen.</p> <p>Meski tetap saja ada penilaian Modernitas DPR kalau hanya dalam perspektif penggunaan digital tentu tidaklah cukup. Parlemen Modern harus dimaknai secara luas dan komprehensif.</p>			
--	--	--	--	--

Tabel 4.1 Peneliti 2020

#### b. Kesesuaian (Compatibility)

Inovasi juga mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang tidak sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.

Informan 1 mengatakan, DPR sudah memulai program parlemen modern sejak 2015 hingga sekarang. Sejumlah capaian telah berhasil

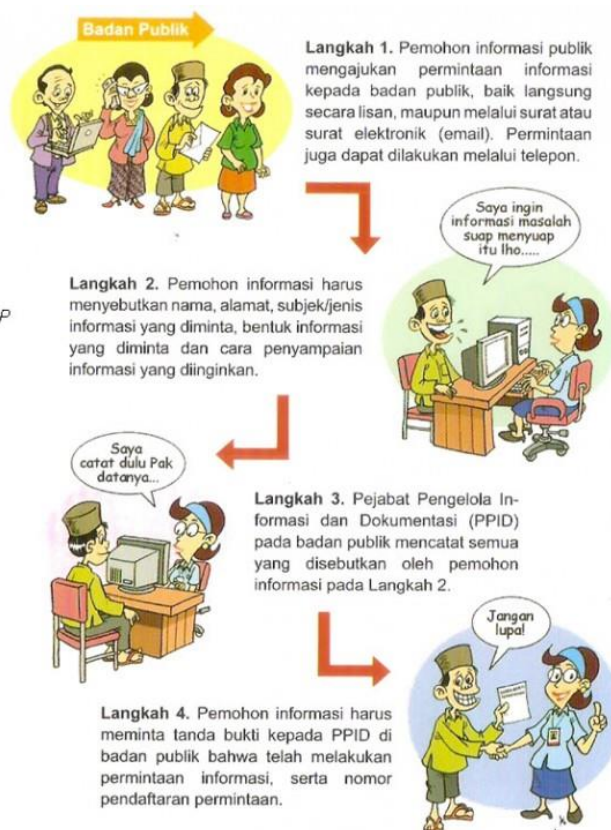
diraih, Akan tetapi konektivitas antara DPR dengan masyarakat yang menjadi konstituen masih perlu ditingkatkan, untuk mendorong partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dengan target audience yang lebih luas dengan memanfaatkan teknologi informasi. Informan 2 menambahkan, tentunya program parlemen modern lahir untuk menyesuaikan kondisi dan perkembangan saat ini.

Adapun informan 4 memaparkan, Parlemen Modern jelas sangat sesuai dengan kondisi saat ini. Kemajuan teknologi dalam revolusi industri 4.0 telah mengubah seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bagaimana DPR berparlemen.

“Kemajuan-kemajuan teknologi informatika yang sangat cepat menjadi peluang bagi DPR, dimanfaatkan sebagai jembatan atas gap antara kondisi saat ini dan apa yang diinginkan ke depan dalam kerangka representasi rakyat.” (Indra Iskandar, 17 September 2020)

## Tata Cara Memperoleh Informasi Publik

*Diadopsi dari Sudibyo, dkk. 2008. Panduan Sederhana Penerapan UU KIP*



Poster tata cara memperoleh Informasi Publik di laman [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

(Gambar 4.5 peneliti, 2020)

Informan 7 pun mengakui, parlemen modern sudah sesuai dengan kondisi saat ini. Namun berbeda dengan informan 5, yang berpendapat, Parlemen modern sudah saatnya diterapkan di DPR. Dunia umumnya sudah jauh berlayar bersama kemajuan teknologi. Apalagi di masa pandemi ini, teknologi modern sangat membantu manusia umumnya untuk tetap bekerja walaupun tak bertemu langsung.

“Ini justru tak terjadi di parlemen kita. Kehadiran perangkat teknologi maupun momentum covid saat ini belum memberikan efek bagi peningkatan kinerja. Kemajuan teknologi belum bisa dimaksimalkan DPR untuk meningkatkan kinerja.” (Lucius Karus, 16 September 2020)

Begitu juga dengan informan 6 yang menyebut, mestinya modernitas parlemen itu diwujudkan dengan penegasan DPR sebagai wakil rakyat.

“Nyatanya, sejak dicetuskan pada 2018 lalu, justru banyak produk legislasi yang bertolak belakang dengan aspirasi publik.” (Ferdian Andi, 18 September 2020)

Dalam wawancara dengan informan juga menunjukkan bahwa perwujudan Parlemen Modern tidak hanya berupa aplikasi DPR Now. Menurut informan 1, saat ini dunia menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0. Teknologi informasi kian memiliki penetrasi yang mendalam terhadap keseharian masyarakat. Informasi menyebar kian pesat dan hoaks menjadi tantangan yang harus diwaspadai dengan penuh kesigapan. Salah satunya dengan aplikasi DPR Now! DPR RI yang menyediakan sumber informasi utama yang dapat dijadikan acuan bagi masyarakat. Bukan hanya menyangkut kinerja DPRRI secara khusus, melainkan juga menyangkut kinerja para penyelenggara pemerintahan lainnya dalam kaitan mitra kerja dengan DPR RI.

Informan 1 juga menyebut, DPR RI juga meresmikan Pusat Penyiaran dan Informasi Parlemen atau Parliament Broadcast and Information Center (PBIC) merupakan wujud komitmen DPR RI menuju

Open Parliament dengan mendukung asas keterbukaan informasi publik, keterwakilan masyarakat dan akuntabilitas. Harapannya bisa membantu masyarakat yang ingin mengetahui proses rapat yang ada di DPR RI sebagai salah satu mekanisme demokrasi. Masyarakat cukup datang ke ruangan inidan bisa melihat seluruh kegiatan di DPR. Dengan didukung pemanfaatan teknologi informasi, Pusat Penyiaran dan Informasi Parlemen memberikan kemudahan bagi masyarakat yang datang ke DPR RI untuk melihat seluruh kegiatan dewan secara real time. Inilah upaya kami untuk lebih terbuka kepada publik dan kita berharap langkah ini dapat menjadikan DPR sebagai salah satu parlemen terbukadi dunia. Pusat Penyiaran dan Informasi Parlemen terkoneksi langsung dengan aplikasi DPR Now!, TV dan Radio Parlemen, Media Sosial resmi DPR RI seperti Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, serta Website DPR RI, sehingga dapat menjadi monitoring terhadap seluruh kegiatan persidangan yang ada di DPR RI. Sedangkan, tampilan yang akan dilihat berupa tayangan audio visual berupa live streaming rapat dari seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) serta akses informasi lainnya.

Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat mengakses aplikasi Pusat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), rumah aspirasi dan Whistle blowing System Inspektorat Utama DPR RI. Peresmian Pusat Penyiaran dan Informasi Parlemen ini adalah bagian dari resolusi tahun 2019 sebagai upaya untuk lebihmendekatkan DPR RI kepada masyarakat.” (Bambang Soesatyo, 16 September 2020)

Informan 2 juga menambahkan, perwujudan dari program Parlemen Modern tidak saja dari aplikasi DPR now, berkaitan dengan keterbukaan informasi dan media parlemen. Akan tetapi program parlemen modern juga dalam perwujudan dalam sarana dan prasarana anggota DPR RI, misal adanya program paperless dalam rapat untuk Anggota DPR RI. Program ini dalam tahapan realisasi, dimana dengan adanya paperless akan mengurangi cetak bahan dalam kertas yang banyak. Selain itu, digitalisasi arsip, perpustakaan dan hasil penelitian juga sedang direalisasikan di DPR RI. Termasuk juga dengan tandatangan

digital untuk DPR yang sedang dalam tahap kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Program Parlemen Modern ini akan terus berjalan untuk menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan DPR baik dalam SDM maupun anggaran tentunya.” (Novita Wijayanti, 17 September 2020)

Adapun informan 3 menegaskan, parlemen Modern itu tema besar. Bentuk implementasinya ada banyak. Aplikasi DPR Now hanya satu dari program dalam Parlemen Modern. Salah satu program parlemen modern di DPR adalah dibentuknya Badan Keahlian Dewan sebagai dapur otak bagi anggota. Badan Keahlian ini berfungsi sebagai bank data yang terus melakukan riset agar anggota dewan mendapatkan pelayanan data yang valid dalam berhadapan dengan pemerintah sekaligus sebagai data pembandingan dari data-data yang disodorkan pemerintah.

“Modernisasi alat komunikasi di DPR akan menyambungkan dengan cepat sumber data dengan anggota sebagai user. (Fahri Hamzah, 18 September 2020)

Informan 4 pun menambahkan, aplikasi DPR Now hanya salah satu dari berbagai penggunaan teknologi kekinian yang dilakukan DPR RI. DPR melalui supporting systemnya yaitu Sekretariat Jenderal DPR RI saat ini sedang membangun segala sesuatunya sehingga Parlemen Modern benar-benar dapat terwujud. Paling tidak, ada 80 Aplikasi berbasis teknologi informatika yang telah berjalan untuk mendukung jalannya pelaksanaan tugas-tugas kedewanan. Di samping itu, laman resmi DPR ([www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)) terus dikembangkan sehingga user friendly untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat terhadap kinerja DPR. Selain itu, DPR RI juga memiliki TV dan Radio Parlemen, yang dikembangkan untuk melakukan peliputan kegiatan kedewanan.

Untuk kalangan milenial, DPR RI juga memiliki akun media sosial di facebook, twitter, instagram, dan kanal youtube. Dengan adanya akun-akun media sosial, DPR RI menangkap adanya peluang besar untuk bagi

DPR untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya yang selama ini mungkin kurang terekspos media.

“Di sisi lain, DPR akan secara cepat menjangkit aspirasi masyarakat secara luas terhadap isu-isu aktual terkini sehingga warganet (netizen) dapat langsung berinteraksi dengan DPR. Interaksi-interaksi masyarakat dengan DPR melalui akun-akun media sosial DPR di dunia maya, tidak dapat dinafikan lagi merupakan salah satu bentuk praktek-praktek dijalankannya prinsip-prinsip parlemen modern.” (Indra Iskandar, 17 September 2020)



Poster sosialisasi beberapa sosial media yang dimiliki DPR RI selain aplikasi DPR Now (gambar 4.6 tangkapan gambar peneliti 2020)

Dalam observasi yang dilakukan pada Senin 28 September 2020, peneliti menemukan setidaknya lima rapat di DPR yang disiarkan di berbagai platform, seperti web DPR RI, youtube, twitter, dan facebook. Rapat tersebut yakni Komisi X DPR RI yang menggelar Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Komisi VI DPR RI yang menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Dirut Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, Dirut Perum Perhutani dan Dirut PT Sarinah, Komisi VIII DPR RI yang

menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI, Menteri Keuangan RI, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Badan Legislasi DPR RI Rapat Panja RUU tentang Cipta Kerja, Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja, dan Komisi XI DPRRI yang menggelar Rapat Kerja dengan Bank Indonesia, terkait Laporan Semester I Kinerja Bank Indonesia.

Hal ini juga diakui informan 7 yang mengatakan, tidak hanya melalui aplikasi untuk mengakses kegiatan DPR. Bisa juga melalui media sosial. Namun informan 5 tetap berpendapat, Parlemen modern mestinya tak sebatas munculnya aplikasi DPR Now saja. Penggunaan aplikasi meeting zoom saat ini dan aneka perangkat teknologi lain seperti media sosial dan TV parlemen juga bagian dari ekspresi kemajuan parlemen. Begitu juga dengan informan 6 yang menilai, Parlemen Modern disimplifikasi dengan aplikasi.

“Padahal, kalau dilihat komentar pengunduh aplikasi itu, mengeluh kesulitan akses dan tidak lengkap seperti tidak adanya risalah rapat update absensi anggota DPR. Maka itu bisa dilihat dari penilaian dari pengunduh tidak sampai bintang lima, hanya 3,4. Ini cukup rendah untuk ukuran lembaga besar seperti DPR. DPR harus evaluasi atas keberadaan aplikasi ini.” (Ferdian Andi, 18 September 2020)

### **Intisari Dimensi Kesesuaian (Compatibility)**

Indikator	Sumber			
	Wawancara	Observasi	Dokumentasi	Simpulan
Kesesuaian (Compatibility)	Parlemen modern lahir untuk menyesuaikan kondisi dan perkembangan	Berdasarkan hasil observasi semua platform media sosial seperti twitter,	Berdasarkan hasil dokumentasi menunjukkan semua rapat yang sifatnya	Teknologi informasi benar-benar dimanfaatkan dalam untuk membuka



	<p>saat ini . Kemajuan teknologi dalam revolusi industri 4.0 telah mengubah seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bagaimana DPR berparlemen. Parlemen Modern tidak saja dari aplikasi DPR now. Parlemen Modern itu tema besar, bentuk implementasinya ada banyak. Paling tidak, ada 80 Aplikasi berbasis teknologi informatika yang telah berjalan untuk mendukung jalannya pelaksanaan</p>	<p>facebook, youtube, dan juga web <a href="http://www.dpr.go.id">www.dpr.go.id</a> menyiarkan rapat yang bersifat terbuka. Memang akan menemukan kendala jika masyarakat tidak memiliki akses internet.</p>	<p>terbuka bisa diakses</p>	<p>akses masyarakat untuk bisa mengikuti rapat atau persidangan di DPR</p>
--	---	--	-----------------------------	--

	tugas-tugas kedewanan.			
--	---------------------------	--	--	--

Tabel 4.2

### c. Kerumitan atau complexity

Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting. Informan 1 mengatakan, aplikasi DPR Now! tidak hanya berfungsi sebagai sarana dalam mendiseminasikan informasi kinerja DPR RI kepada masyarakat, melainkan juga sebagai sarana komunikasi yang mampu menghubungkan rakyat dengan wakilnya. Dan pada gilirannya, juga mampu menghubungkan para *stake holders* terkait, termasuk di dalamnya mitra kerja DPR RI dari jajaran eksekutif dalam merumuskan solusi atas persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Aplikasi DPR Now! Menjadi akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan memantau kegiatan, kinerja dan capaian DPR RI dari mana saja dan kapan saja menggunakan *smartphone*.

“Melalui aplikasi ini masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dan pengaduannya, serta memperoleh kepastian transparansi penanganan pengaduan yang mereka ajukan. Termasuk jika dalam proses penyelesaian hal yang diadukan tersebut melibatkan kementerian/lembaga atau institusi lain.” (Bambang Soesatyo, 16 September 2020)

Informan 2 mengakui tidak semua anggota DPR mampu mengakses atau memanfaatkan secara optimal aplikasi DPR now ini. Inilah yang jadi lambatnya penerapan Parlemen Modern saat ini. Ragam dari anggota DPR dari segi usia, latar belakang keilmuan dan sosial membuat aplikasi DPR now ini sedikit lambat. Ada anggota DPR yang sangat muda, millennial yang cepat dalam menangkap perubahan dan perkembangan teknologi.

“Tetapi juga ada anggota DPR yang cukup tua yang sulit dalam menggunakan aplikasi DPR now ini. Transfer budaya teknologi ini

tidak mudah untuk DPR yang beragam latar belakang anggota DPR RI nya ini.” (Novita Wijayanti, 17 September 2020)

Informan 4 menambahkan, sebenarnya aplikasi DPR Now lebih ditujukan kepada masyarakat dalam kerangka keterbukaan dan transparansi, sebagai saluran yang dapat digunakan untuk menyalurkan aspirasi dan pengaduan masyarakat dan mengetahui apa yang dikerjakan oleh DPR.

“Namun, aplikasi DPR Now juga memang digunakan oleh para Anggota DPR untuk melihat aspirasi yang disampaikan, dan meng-update informasi yang diperlukan. Pada prinsipnya, aplikasi-aplikasi yang dikembangkan dapat mudah digunakan oleh setiap orang, terlebih para Anggota DPR.” (Indra Iskandar, 17 September 2020)

Peneliti juga membuka aplikasi DPR Now menemukan kanal aduan masyarakat terhadap berbagai persoalan. Dan di kanal lainnya ada laporan tindak lanjut aduan masyarakat.. Aduan tersebut dimasukkan ke komisi terkait DPR. Proses aduannya pun ada tiga tahap, yakni diterima, mulai proses, dan penyelesaian.



Aduan masyarakat melalui aplikasi DPR Now (gambar 4.7)



Proses penanganan aduan di aplikasi DPR Now (gambar 4.8)

Informan 5 juga menilai, justru ini yang menjadi persoalan. Aplikasi sudah tersedia tetapi anggota parlemennya justru terlihat gagap menggunakannya.

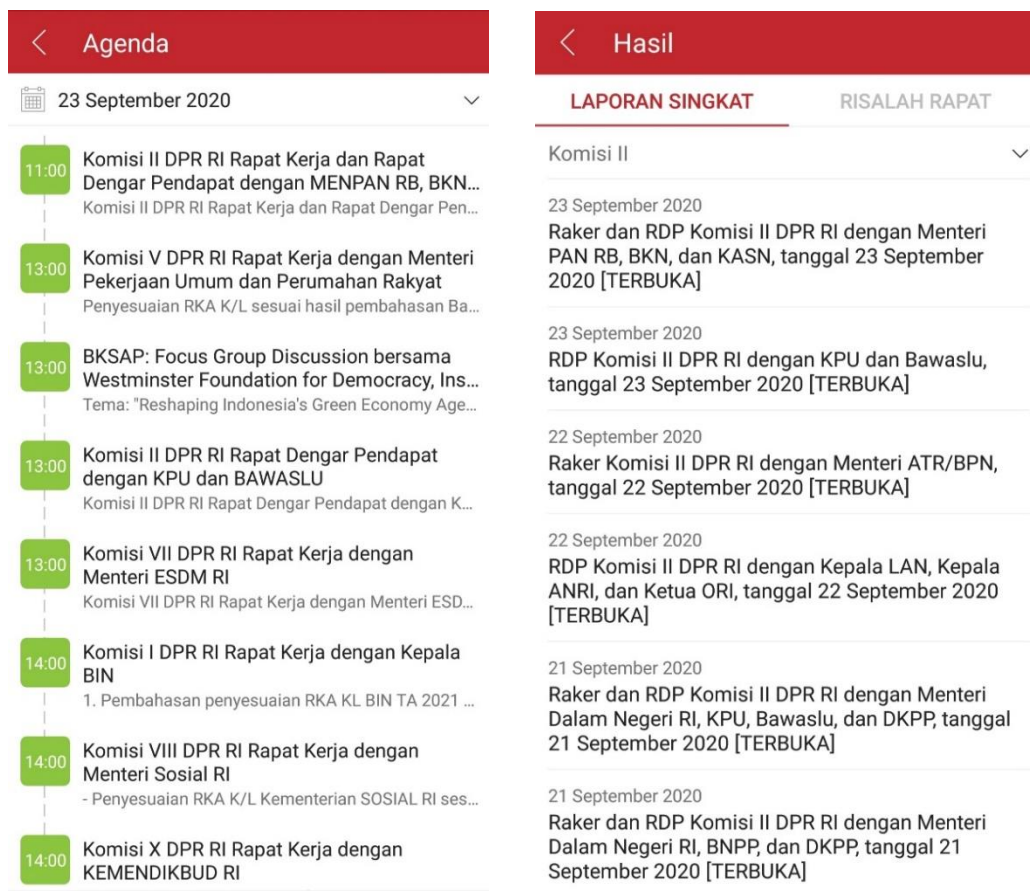
“Saya melihat tak semua anggota menggunakan secara efektif aplikasi DPR Now untuk kepentingan peningkatan kinerja pribadi maupun Lembaga. (Lucius Karus, 16 September 2020).

Begitu pun dengan Ferdian dan Tri Muljoko Bayuaji yang masih sangsi anggota DPR sudah optimalkan memanfaatkan aplikasi tersebut.

Meski masih ada kendala di anggota DPR namun informan 1 memastikan, aplikasi “DPR Now!” saat ini sudah bisa diunduh melalui smartphone, merupakan salah satu perwujudan menuju parlemen modern. Dengan pemanfaatan kecanggihan teknologi digital, DPR RI bisa hadir di tengah-tengah rakyat. Rakyat tidak perlu lagi bertanya-

tanya sedangapa Anggota DPR di kantornya, cukup dipantau melalui smartphone atau telepon pintar, dengan aplikasi DPR NOW, ada konten yang memuat aktifitas DPR dari Komisi I-XI. Dengan aplikasi “DPRNow!” seluruh Anggota DPR RI bisa berbangga hati. Masyarakat bisa menyaksikan dengan langsung kritik yang dilayangkan DPR RI terhadap pemerintah dalam rangka melakukan fungsi pengawasan. Termasuk juga masyarakat bisa mengetahui aspirasinya telah disampaikan kepada pemerintah. Masyarakat juga bisa mengakses Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang dibahas. Kemudian kesimpulan dari rapat sudah bisa diakses satu jam setelah rapat dinyatakan selesai.

Peneliti juga melakukan penelusuran terhadap aplikasi DPR Now apakah benar mempermudah akses informasi terhadap kegiatan kedewanan. Pada tanggal 23 September 2020 terdapat agenda rapat Komisi yang ada di DPR. Kemudian selesai rapat terdapat laporan singkat dan juga risalah rapat per komisi di aplikasi DPR Now.



Agenda rapat Komisi di Aplikasi  
DPR Now (gambar 4.9)

Laporan singkat hasil rapat per  
komisi di aplikasi DPR Now (gambar  
4.10)

Informan 4 pun menyebut, masyarakat dalam mengakses aplikasi DPR now dapat didapat di layanan Playstore, atau dengan mengakses google untuk mendapatkan aplikasi ini.

“Aplikasi dapat dengan mudah diunduh di smartphone, baik yang menggunakan sistem operasi android maupun IOS.” (Indra Iskandar, 17 September 2020)

Sementara informan 5 menilai seolah respons publik juga sangat terbatas dengan aplikasi DPR Now.

“Bagaimana mau mengakses jika tak ada nilai tambah yang ditawarkan aplikasi ini? (Lucius Karus, 16 September 2020)

Informan 6 juga berpendapat, dari antusiasme publik atas aplikasi ini cukup rendah. Setidaknya penilaian atas aplikasi ini cukup rendah. Tidak sampai bintang lima.

### Intisari Dimensi Kerumitan atau complexity

Indikator	Sumber			
	Wawancara	Observasi	Dokumentasi	Simpulan
Kerumitan atau complexity	Berdasarkan wawancara bahwa Aplikasi DPR Now lebih ditujukan kepada masyarakat dalam kerangka keterbukaan dan transparansi, sebagai saluran yang dapat digunakan untuk menyalurkan aspirasi dan pengaduan masyarakat dan mengetahui apa yang dikerjakan oleh	Penelusuran terhadap aplikasi DPR Now apakah benar mempermudah akses informasi terhadap kegiatan kedewanan. Pada tanggal 23 September 2020 terdapat agenda rapat Komisi yang ada di DPR. Kemudian selesai rapat terdapat laporan singkat dan juga risalah	Tangkapan gambar aplikasi DPR Now	Aplikasi DPR Now sudah berjalan baik meski tetap terus penyempurnaan. Anggota DPR pun diharapkan dapat mengoptimalkan aplikasi ini.

	<p>DPR. Memang tidak semua anggota DPR mampu mengakses atau memanfaatkan secara optimal aplikasi DPR now ini. Inilah yang jadi lambatnya penerapan Parlemen Modern saat ini. justru ini yang menjadi persoalan.</p>	<p>rapat per komisi di aplikasi DPR Now.</p>		
--	---	--	--	--

Tabel 4.3

#### d. Kemungkinan Dicoba (Triability)

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase “uji publik” dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi. Informan 1 menaruh harapan besar kepada Anggota DPR RI 2019-2024 untuk meneruskan upaya DPR RI menjadi Parlemen Modern, yang pencanangan dan pelaksanaannya sudah dimulai oleh DPR RI periode 2014-2019. Serta yang tak kalah penting, tetap membangun kondusifitas politik dengan pemerintah dengan tidak meninggalkan kerangka check and balances. Namun tidak sampai menimbulkan turbulensi politik. DPR RI periode 2019-2024 akan dituntut untuk bekerja keras mewujudkan demokrasi yang bukan sekadar prosedural melainkan juga substansial.



Informan 1 juga mengingatkan, pendiri bangsa telah mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia sebaiknya bukan sekadar demokrasi politik, tetapi demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Demokrasi bukan tujuan akhir, tetapi alat atau sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sinisme dan rendahnya kepercayaan publik masih akan menjadi tantangan bagi DPR RI ke depan.

“Melalui DPR RI yang modern dan terbuka, kita akan terus berupaya menjawab kritikan tersebut dengan menyajikan informasi-informasi positif mengenai apa yang telah dilakukan oleh DPR RI. Ke depan, DPR RI perlu menjaga marwah dan kewibawaannya, serta memiliki kemandirian sebagaimana yang selalu diperjuangkan DPR RI saat ini.” (Bambang Soesatyo, 16 September 2020)

Sementara informan 2 menambahkan, tentunya program parlemen modern ini dapat dilaksanakan di parlemen, tetapi transfer atau alih budaya konvensional ke budaya teknologi tidak mudah.

“Mengingat ragam dari latarbelakang dari anggota DPR RI. Tetapi optimism untuk menerapkannya di DPR akan selalu ada dan tentunya program ini sudah menjadi program yang masuk dalam Rencana Strategis DPR RI 2019-2024.” (Novita Wijayanti, 17 September 2020)

Adapun informan 3 menegaskan, Parlemen Modern dalam proses menjadi dan terus menjadi.

“Tiap priode pimpinan DPR membentuk team optimalisasi parlemen modern. Silahkan akses laporannya dan lihat perkembangan capaian tiap periode.” (Fahri Hamzah, 18 September 2020)

Informan 4 memaparkan, konsep Parlemen Modern bagi DPR adalah keniscayaan. Artinya DPR pada masa mendatang akan menjalankan konsep-konsep Parlemen Modern. Kemajuan teknologi, dinamika politik yang tinggi dan tuntutan masyarakat yang cepat mengalami perubahan mengharuskan DPR untuk dapat beradaptasi.

“Dengan demikian, konsep Parlemen Modern bukan lagi tentang bisa atau tidak bisa dilaksanakan pada masa mendatang, tetapi lebih pada kebutuhan DPR untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya.” (Indra Iskadar, 17 September 2020)

Sementara informan 5 berpendapat, Parlemen modern mestinya sudah harus dilaksanakan di masa mendatang. Dan yang paling penting adalah bagaimana menyiapkan anggota parlemen di masa mendatang yang punya paradigma berpikir modern. Hampir senada, informan 6 menilai, Parlemen Modern harus bicara substansial, bukan formalitas dan seremonial yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini. Meski harus diakui ada kemajuan dari sisi pemanfaatan media sosial yang dimiliki DPR. Seperti rapat-rapat alat kelengkapan DPR dapat disaksikan dengan mudah warga negara melalui media sosial yang dimiliki DPR. Bukan dari aplikasi DPR NOW. Adapun informan 7 pun yakin DPR mendatang bisa melanjutkan Parlemen Modern dengan terus mengikuti tuntutan jaman.

Terkait partisipasi masyarakat, informan 1 mengatakan, masyarakat bisa mengikuti perkembangan, termasuk pengaduan yang ada di DPR Now!. Diharapkan kelak aplikasi ini dapat juga terkoneksi dengan semua kementerian/lembaga, sehingga kedepan kita memiliki sistem terpadu dalam menanggapi aspirasi dan pengaduan masyarakat.

“Selain itu, aplikasi tersebut bisa menjadi bagian dari solusi atas beragam persoalan yang ada di tengah masyarakat. (Bambang Soesatyo, 16 September 2020)

Informan 2 menambahkan, partisipasi masyarakat pasca pelaksanaan parlemen modern cukup baik, dilihat dari minat untuk mengakses aplikasi DPR now dan mengakses website DPR untuk keterbukaan informasi dan media parlemen. Tetapi DPR RI juga menyadari, program ini masih kurang tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh masyarakat.

“Dan keterbatasan masyarakat juga beragam untuk kemampuan mengakses dan transfer/alih teknologi seperti ini.” (Novita Wijayanti, 17 September 2020)

Sementara informan 4 memaparkan, sejak DPR RI mencanangkan dirinya menuju Parlemen Modern, terdapat peningkatan partisipasi masyarakat di dalam proses-proses politik yang dijalankan oleh DPR.

“Penggunaan berbagai aplikasi berbasis teknologi informatika dan akun-akun media sosial yang dimiliki DPR RI memudahkan masyarakat untuk turut serta dalam menyampaikan aspirasinya, baik perseorangan maupun secara berkelompok.” (Indra Iskandar, 17 September 2020)

Sosial media apa saja yang aktif digunakan DPR dalam menyosialisasikan kegiatan kedewanan, peneliti penelusuri di beberapa platform media sosial secara langsung.



Rapat Kerja Komisi XI dengan Bank Indonesia (Gambar 4.11 Peneliti, 2020)



Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama (Gambar 4.12, peneliti, 2020)



Rapat Komisi Kerja VIII dengan Menteri Agama (gambar 4.13 peneliti 2020)

Adapun informan 5 memberi masukan partisipasi masyarakat juga mestinya bisa lebih ditingkatkan lagi karena akses DPR Now bisa lebih mudah dan murah. Masyarakat tak perlu harus ke parlemen untuk menyampaikan aspirasinya.

“Tapi agar mimpi ini terwujud, mesti ditunjukkan dulu seberapa aplikasi DPR Now ini dianggap penting sebagai media utama DPR dalam berkomunikasi dengan masyarakat.” (Lucius Karus, 16 September 2020)

Lebih tegas disampaikan Ferdian yang menilai, parlemen modern belum memberi dampak apa-apa terhadap partisipasi publik. Aspirasi warga negara melalui demonstrasi maupun aspirasi yang muncul di media, tidak mendapat respons dengan baik oleh DPR. Begitu juga dengan Tri Muljoko Bayuaji yang menyebut masih belum optimal karena komunikasi mayoritas masih searah.

“Aspirasi warga negara melalui RUU KPK, RUU Cipta Kerja, RUU Minerba dan berbagai RUU lainnya yang tidak mendapat feedback secara baik dari DPR.” (Ferdian Andi, 18 September 2020)

### Intisari Kemungkinan Dicoba/Triability

Indikator	Sumber			
	Wawancara	Observasi	Dokumentasi	Simpulan
Kemungkinan Dicoba (Triability),	DPR akan selalu ada dan tentunya program ini sudah menjadi program yang masuk dalam Rencana Strategis DPR RI 2019-2024. Parlemen Modern juga dalam proses menjadi dan terus menjadi. Tiap priode pimpinan DPR membentuk team optimalisasi parlemen modern. Sejak DPR RI mencanangkan dirinya menuju Parlemen Modern,	DPR tidak menggunakan aplikasi DPR Now, tetapi juga berbagai platform media sosial agar semakin luas menjangkau masyarakat.	Tangkapan gambar sosial media yang digunakan DPR	Parlemen modern akan terus dilakukan DPR karena juga telah masuk dalam Rencana Strategis DPR RI 2019-2024. Terdapat peningkatan partisipasi masyarakat di dalam proses-proses politik yang dijalankan oleh DPR.

	<p>terdapat peningkatan partisipasi masyarakat di dalam proses-proses politik yang dijalankan oleh DPR. Penggunaan berbagai aplikasi berbasis teknologi informatika dan akun-akun media sosial yang dimiliki DPR RI memudahkan masyarakat untuk turut serta dalam menyampaikan aspirasinya, baik perseorangan maupun secara berkelompok. Namun dilain sisi, partisipasi masyarakat juga mestinya bisa lebih ditingkatkan lagi</p>			
--	---	--	--	--

	<p>karena akses DPR Now bisa lebih mudah dan murah.</p> <p>Masyarakat tak perlu harus ke parlemen untuk menyampaikan aspirasinya. Tapi agar mimpi ini terwujud, mesti ditunjukkan dulu seberapa aplikasi DPR Now ini dianggap penting sebagai media utama DPR dalam berkomunikasi dengan masyarakat.</p> <p>Parlemen modern juga dinilai belum memberi dampak apa-apa terhadap partisipasi publik. Aspirasi warga negara melalui demonstrasi</p>			
--	--	--	--	--

	<p>maupun aspirasi yang muncul di media, tidak mendapat respons dengan baik oleh DPR.</p>			
--	---	--	--	--

(Tabel 4.4)

#### e. Kemudahan Diamati atau Observability

Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Menurut informan 1, kinerja DPR amat baik setelah melaksanakan Parlemen Modern. Begitu juga informan 2 yang mengatakan, kinerja DPR setelah melaksanakan parlemen modern cukup baik, terutama dalam keterbukaan informasi dan media parlemen. Untuk peningkatan kinerja lainnya, beberapa program masih dalam tahapan realisasi. Dan perlu diketahui bahwa program parlemen modern ini masih terbatas pada pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik.

“Sementara untuk menunjang kinerja Anggota DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum cukup bisa memfasilitasi, mengingat beberapa program untuk mendukung parlemen modern masih dalam tahap perencanaan dan penerapan. Dan juga keterbatasan anggaran dalam melaksanakannya harus disadari betul. Disamping itu, dalam penerapan parlemen modern, DPR juga masih terkendala dengan adanya kekurangan SDM untuk support dalam transfer/alih teknologi tersebut.” (Novita Wijayanti, 17 September 2020)

Selain menyediakan layanan informasi secara daring, DPR juga membuka Layanan Informasi Publik yang terdapat di Nusantara 3 Komplek DPR.





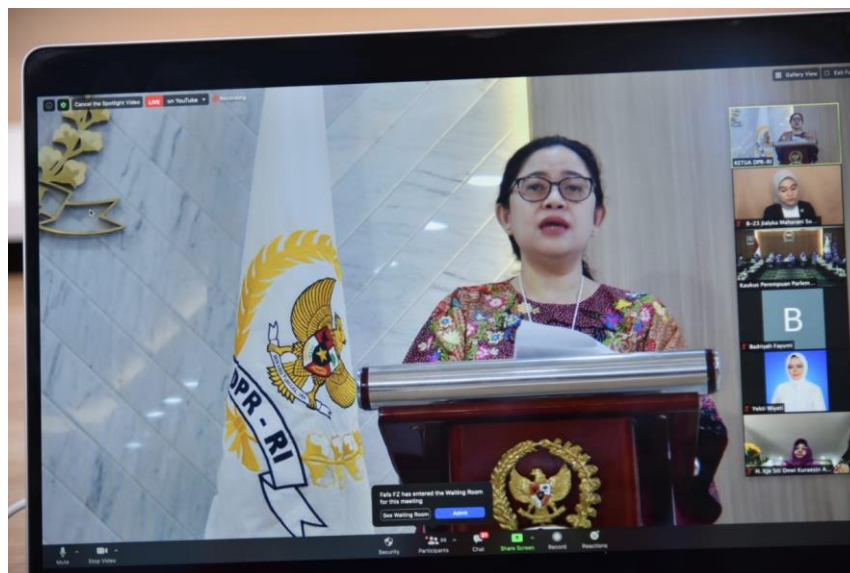
(Gambar 4.14 Ruang Layanan Informasi Publik DPR)

Informan 4 memaparkan, merujuk pada Laporan Kinerja DPR RI terakhir, yaitu Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2019-2020, Kinerja DPR RI dapat dikatakan bagus dengan mempertimbangkan tantangan dan hambatan terbesar yang dihadapi saat ini, yaitu Pandemi Covid-19. DPR RI bergerak cepat dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian terkait dengan pelaksanaan seluruh kegiatan di Alat Kelengkapan DPR (AKD), yaitu dengan memfokuskan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi kepada penanganan pandemi covid-19. Artinya, seluruh AKD menjalankan tugas dan fungsinya harus terkait dengan apa yang dilakukan mitra kerjanya terhadap penanganan pandemi covid-19. Sebagai contoh, Komisi IV yang membidangi pertanian, melakukan fungsi pengawasan terhadap ketahanan pangan selama pandemi, dan Komisi X yang membidangi pendidikan, secara intens melakukan rapat-rapat dengan Menteri Pendidikan terkait dengan kebijakan apa yang dibuat terkait dengan pola pembelajaran dan kendala pembelajaran jarak jauh tersebut. Dalam hal penyelenggaraannya, DPR RI pun melakukan penyesuaian-penyesuaian tata cara rapat, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid 19 dimana kehadiran fisik anggota dan mitra kerja dibatasi di dalam

ruang rapat, dan menyelenggarakan rapat-rapat secara videoconference.

“Dengan adanya pandemi ini sebenarnya DPR RI mendapatkan momentum yang luar biasa dalam upayanya menuju parlemen modern, melalui penggunaan teknologi informatika di dalam rapat-rapatnya.” (Indra Iskandar, 17 September 2020)

Pemanfaat teknologi informasi amat bisa dirasakan pada masa pandemi saat ini. Anggota DPR bisa mengikuti rapat atau kegiatan kedewanan dari mana pun. Seperti saat Ketua DPR RI periode 2019-2024 Puan Maharani melantik Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia yang dilakukan secara virtual.



(Gambar 4.15 Peneliti, 2020)

Atau rapat panitia kerja yang diikuti anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Fikri Faqih yang diikuti secara virtual.



(gambar 4.16, penulis 2020)

Namun menurut informan 5, kinerja DPR setelah melaksanakan parlemen modern mestinya juga bisa ditingkatkan karena banyak hal bisa dikerjakan tanpa harus menunggu kesamaan waktu untuk rapat.

“Sumbangsih pemikiran untuk merumuskan sesuatu bisa dilakukan kapan saja. maka harusnya kinerja mereka meningkat.” (Lucius Karus, 16 September 2020)

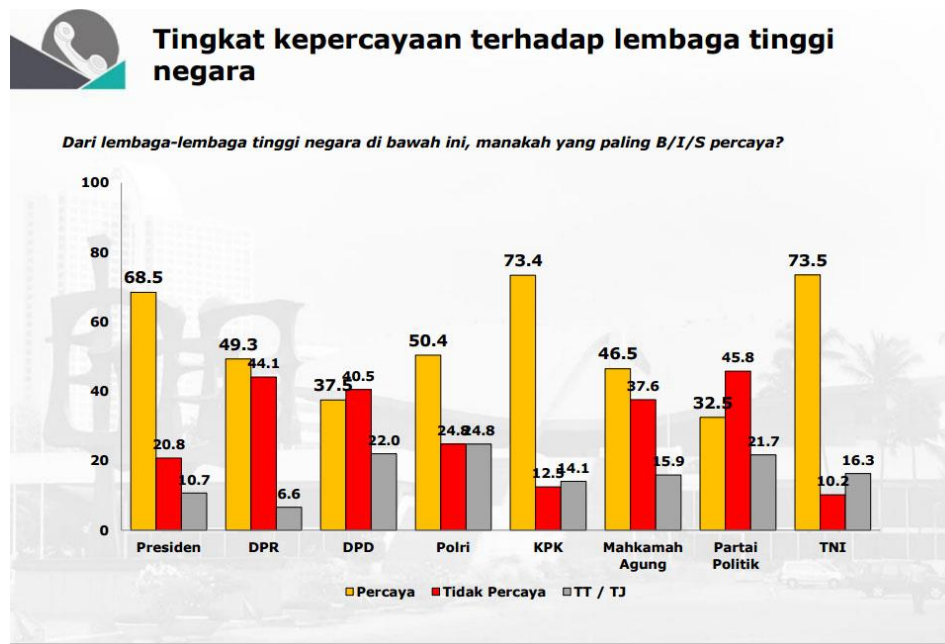
Sementara informan 6 menilai singkat, tidak ada perbedaan signifikan. Begitu juga menurut informan 7 yang mengatakan, belum optimal, karena sebatas tampilan saja.

“Belum ada komunikasi dua arah.” (Tri Mujoko Bayuaji, 16 September 2020)

Meski begitu, informan 1 tetap yakin persepsi masyarakat tetap membaik setelah melaksanakan parlemen modern. Setidaknya ditunjukkan survei yang dilakukan Charta Politika pada Agustus 2018 lalu menunjukkan responden yang menilai DPR RI lebih terbuka mencapai 38,8 persen. Responden yang menilai kinerja DPR RI semakin baik sebanyak 34,8 persen. Begitu juga hasil survei Politika Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI), pada Februari

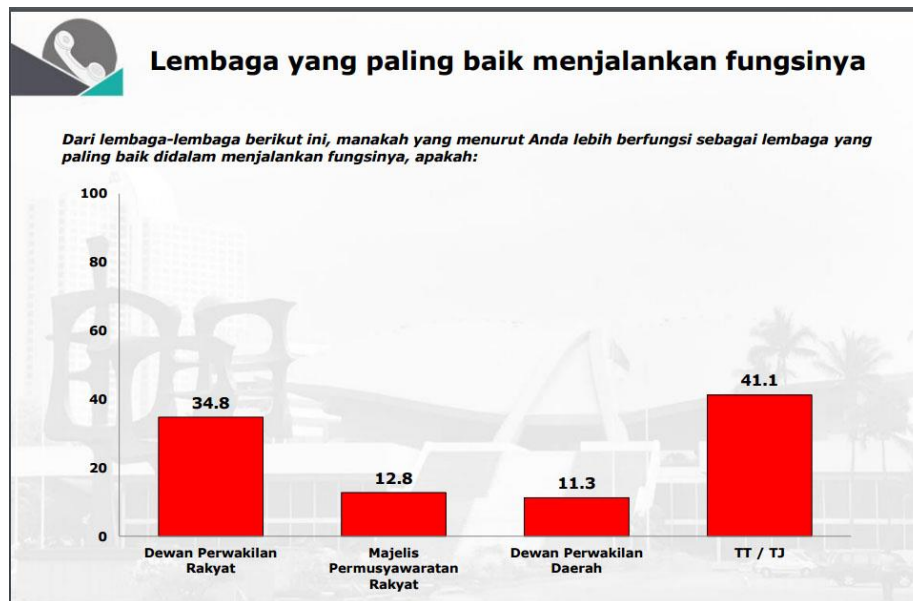
2020 lalu, menunjukkan sebanyak 50,5 persen responden menilai kinerja DPR baik.

Peneliti coba mengumpulkan data soal hasil survei yang dimaksud. Untuk hasil survei Charta Politika diperoleh :



(gambar 4.17, penulis 2020)

Laporan ini menyajikan hasil phone survei mengenai Kinerja DPR RI tahun 2018. Proses pengumpulan data dilaksanakan dari tanggal 23-26 Agustus 2018. Wawancara melalui telepon. Tersebar di 8 kota besar yakni Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar.

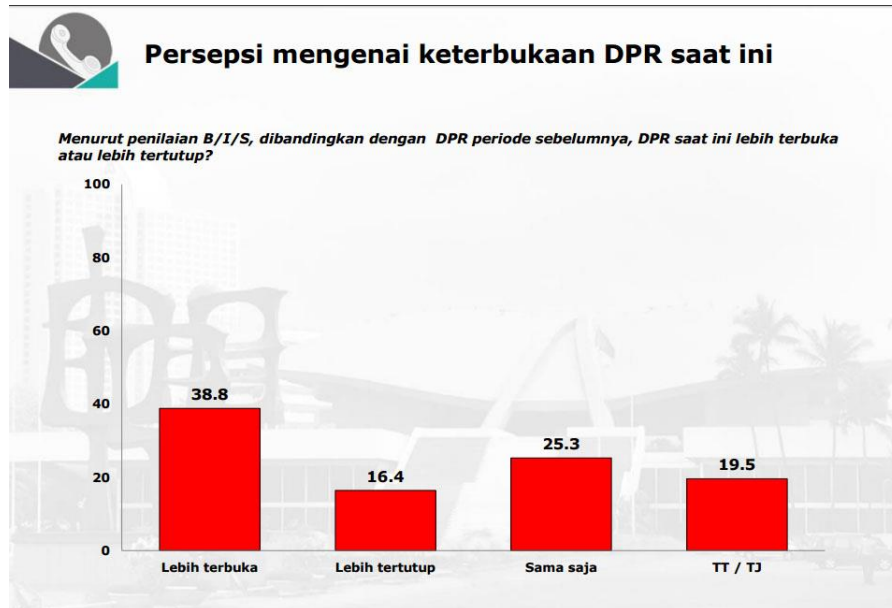


(gambar 4.18, penulis 2020)

Jumlah responden sebanyak 800 orang yang tersebar secara proporsional berdasarkan populasi pengguna telepon di 8 kota besar. Pemilihan responden dilakukan dengan melakukan pengacakan sistematis. Toleransi kesalahan phone survei (margin of error) + 3.46% pada tingkat kepercayaan 95%.

Informan 2 juga menyebut, sejauh ini respon atau persepsi dari masyarakat dalam penerapan parlemen modern cukup baik untuk pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik.

“Meski masih banyak juga kritikan terhadap keterbukaan informasi dan pelayanan publik untuk mengakses beragam info dan data di DPR.”  
(Novita Wijayanti, 17 September 2020)



(gambar 4.19, penulis 2020)

Sementara Informan 4 menambahkan, respons masyarakat terhadap DPR setelah mencanangkan dirinya menjadi Parlemen Modern sangatlah baik. Ini terlihat dari berbagai kanal media sosial yang dimiliki DPR bahwa masyarakat dan DPR semakin terlihat berinteraksi terhadap sesuatu hal yang berkembang di masyarakat. Tidak hanya itu, dengan penggunaan teknologi informatika, DPR semakin terbuka di dalam menerima aspirasi dan pengaduan masyarakat dimana dengan membandingkan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada DPR. Merujuk Laporan Kinerja DPR yang selalu disampaikan Pimpinan DPR RI setiap tahunnya, terdapat kenaikan aspirasi dan pengaduan masyarakat melalui aplikasi pengaduan masyarakat di laman resmi DPR, yaitu 336 aspirasi/pengaduan masyarakat pada Tahun Sidang 2018-2019 menjadi 616 aspirasi/pengaduan masyarakat pada Tahun Sidang 2019-2020.

“Ini berarti, secara umum persepsi masyarakat telah terbentuk bahwa penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada DPR dapat dilakukan dengan menggunakan kanal-kanal yang dimiliki DPR. Tidak ada lagi hambatan jarak dan waktu bagi masyarakat di dalam

menyampaikan apa pun kepada wakil rakyatnya.” (Indra Iskandar, 17 September 2020)



Masyarakat tengah menonton rapat di TV Parlemen di lingkungan Gedung DPR Senayan (gambar 4.20, Peneliti, 2020)

Di sisi lain, Informan 5 berpendapat, respons masyarakat setelah parlemen modern dilaksanakan harusnya positif jika parlemen modern ini bukan hanya sekedar jargon saja tetapi benar-benar diaplikasikan dalam tata kelola parlemen. Adapun informan 6 menyebut, tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah penerapan Parlemen Modern. Namun bagi informan 7 tetap melihat respon masyarakat sudah bagus hanya tinggal dikembangkan pola komunikasinya.

#### **Intisari indikator Kemudahan Diamati atau Observability**

Indikator	Sumber			
	Wawancara	Observasi	Dokumentasi	Simpulan
	Tidak hanya itu, dengan	Upaya keterbukaan	Hasil survei dari	Keterbukaan parlemen bisa

Kemudahan Diamati atau Observability	<p>penggunaan teknologi informatika, DPR semakin terbuka di dalam menerima aspirasi dan pengaduan masyarakat dimana dengan membandingkan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada DPR. Merujuk Laporan Kinerja DPR yang selalu disampaikan Pimpinan DPR RI setiap tahunnya, terdapat kenaikan aspirasi dan pengaduan masyarakat melalui aplikasi pengaduan masyarakat di laman resmi DPR, yaitu 336</p>	DPR tidak hanya melalui teknologi informasi atau daring, upaya lain juga dilakukan dengan membuka Layanan Informasi Publik	Lembaga Survei	dilakukan dengan memanfaatkan teknologi atau yang disebut dengan parlemen, namun upaya lain yang bisa mendekatkan masyarakat dengan wakil rakyat secara langsung juga tetap perlu dilakukan.
--	---	--	----------------	--



	<p>aspirasi/pengaduan masyarakat pada Tahun Sidang 2018-2019 menjadi 616 aspirasi/pengaduan masyarakat pada Tahun Sidang 2019-2020.</p> <p>Menurut Indra, ini berarti, secara umum persepsi masyarakat telah terbentuk bahwa penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada DPR dapat dilakukan dengan menggunakan kanal-kanal yang dimiliki DPR. Tidak ada lagi hambatan jarak dan waktu bagi masyarakat di dalam menyampaikan apa pun kepada wakil rakyatnya.</p>			
--	---	--	--	--

(Table 4.6)

### HASIL ANALISIS INTISARI DESKRIPSI INDIKATOR

Berdasarkan hasil wawancara observasi, dan dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian :

Indikator	Sumber			
	Wawancara	Observasi	Dokumentasi	Simpulan
Keuntungan Relatif (Relative Advantage)	Parlemen Modern merupakan parlemen yang menerapkan transparansi, teknologi informasi, dan representasi. Seluruh kegiatan DPR dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat melalui aplikasi online dan Sistem digitalisasi alat komunikasi semisal akan mempermudah akses anggota dewan terhadap informasi. Sesungguhnya konsep parlemen modern merupakan bagian dari Rencana	Dalam laman resmi <a href="http://www.dpr.go.id">www.dpr.go.id</a> peneliti menemukan mobile PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan aplikasi DPR Now, keduanya merupakan upaya pewujudan Parlemen Modern yang memudahkan masyarakat mengakses kegiatan anggota DPR.	Visual atau informasi kegiatan anggota DPR di laman resmi DPR dan aplikasi DPR Now	Berdasarkan data yang diperoleh dari dimensi Keuntungan Relatif / Relative Advantage dalam inovasi DPR mewujudkan Parlemen Modern cukup baik. Banyak cara, baik anggota DPR maupun masyarakat memanfaatkan teknologi informasi yang mempermudah akses kedua pihak.

	<p>Strategis (renstra) DPR RI periode 2014-2019 untuk memudahkan kinerja anggota DPR RI. parlemen modern adalah terjaminnya hak hak partisipasi masyarakat untuk dapat mengakses sumber informasi di DPR RI. Keterbukaan dan transparansi akan memainkan peran penting bagaimana masyarakat mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh para wakilnya di parlemen, dan di sisi lain masyarakat akan lebih dapat secara aktif turut serta atau berpartisipasi dalam proses-proses politik di parlemen.</p>			
--	---	--	--	--

	<p>Meski tetap saja ada penilaian Modernitas DPR kalau hanya dalam perspektif penggunaan digital tentu tidaklah cukup. Parlemen Modern harus dimaknai secara luas dan komprehensif.</p>			
<p>Kesesuaian (Compatibility)</p>	<p>Parlemen modern lahir untuk menyesuaikan kondisi dan perkembangan saat ini . Kemajuan teknologi dalam revolusi industri 4.0 telah mengubah seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bagaimana DPR berparlemen. Parlemen Modern tidak saja dari aplikasi DPR now. Parlemen Modern</p>	<p>Berdasarkan hasil observasi semua platform media sosial seperti twitter, facebook, youtube, dan juga web <a href="http://www.dpr.go.id">www.dpr.go.id</a> menyiarkan rapat yang bersifat terbuka. Memang akan menemukan kendala jika masyarakat</p>	<p>Berdasarkan hasil dokumentasi menunjukkan semua rapat yang sifatnya terbuka bisa diakses</p>	<p>Teknologi informasi benar-benar dimanfaatkan dalam untuk membuka akses masyarakat untuk bisa mengikuti rapat atau persidangan di DPR</p>

	itu tema besar, bentuk implementasinya ada banyak. Paling tidak, ada 80 Aplikasi berbasis teknologi informatika yang telah berjalan untuk mendukung jalannya pelaksanaan tugas-tugas kedewanan.	tidak memiliki akses internet.		
Kerumitan atau complexity	Berdasarkan wawancara bahwa Aplikasi DPR Now lebih ditujukan kepada masyarakat dalam kerangka keterbukaan dan transparansi, sebagai saluran yang dapat digunakan untuk menyalurkan aspirasi dan pengaduan masyarakat dan mengetahui apa yang dikerjakan oleh DPR.	Penelusuran terhadap aplikasi DPR Now apakah benar mempermudah akses informasi terhadap kegiatan kedewanan. Pada tanggal 23 September 2020 terdapat agenda rapat Komisi yang ada di DPR. Kemudian	Tangkapan gambar aplikasi DPR Now	Aplikasi DPR Now sudah berjalan baik meski tetap terus penyempurnaan. Anggota DPR pun diharapkan dapat mengoptimalkan aplikasi ini.

	<p>Memang tidak semua anggota DPR mampu mengakses atau memanfaatkan secara optimal aplikasi DPR now ini. Inilah yang jadi lambatnya penerapan Parlemen Modern saat ini. justru ini yang menjadi persoalan.</p>	<p>selesai rapat terdapat laporan singkat dan juga risalah rapat per komisi di aplikasi DPR Now.</p>		
<p>Kemungkinan Dicoba (Triability),</p>	<p>DPR akan selalu ada dan tentunya program ini sudah menjadi program yang masuk dalam Rencana Strategis DPR RI 2019-2024. Parlemen Modern juga dalam proses menjadi dan terus menjadi. Tiap priode pimpinan DPR membentuk team optimalisasi parlemen modern. Sejak DPR RI</p>	<p>DPR tidak menggunakan aplikasi DPR Now, tetapi juga berbagai platform media sosial agar semakin luas menjangkau masyarakat.</p>	<p>Tangkapan gambar sosial media yang digunakan DPR</p>	<p>Parlemen modern akan terus dilakukan DPR karena juga telah masuk dalam Rencana Strategis DPR RI 2019-2024. Terdapat peningkatan partisipasi masyarakat di dalam proses-proses politik yang dijalankan oleh DPR.</p>

	<p>mencanangkan dirinya menuju Parlemen Modern, terdapat peningkatan partisipasi masyarakat di dalam proses-proses politik yang dijalankan oleh DPR. Penggunaan berbagai aplikasi berbasis teknologi informatika dan akun-akun media sosial yang dimiliki DPR RI memudahkan masyarakat untuk turut serta dalam menyampaikan aspirasinya, baik perseorangan maupun secara berkelompok. Namun dilain sisi, partisipasi masyarakat juga mestinya bisa lebih ditingkatkan lagi karena akses DPR Now bisa lebih</p>			
--	--	--	--	--

	<p>mudah dan murah. Masyarakat tak perlu harus ke parlemen untuk menyampaikan aspirasinya. Tapi agar mimpi ini terwujud, mesti ditunjukkan dulu seberapa aplikasi DPR Now ini dianggap penting sebagai media utama DPR dalam berkomunikasi dengan masyarakat.</p> <p>Parlemen modern juga dinilai belum memberi dampak apa-apa terhadap partisipasi publik. Aspirasi warga negara melalui demonstrasi maupun aspirasi yang muncul di media, tidak mendapat respons dengan baik oleh DPR.</p>			



Kemudahan Diamati atau Observability	Tidak hanya itu, dengan penggunaan teknologi informatika, DPR semakin terbuka di dalam menerima aspirasi dan pengaduan masyarakat dimana dengan membandingkan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada DPR. Merujuk Laporan Kinerja DPR yang selalu disampaikan Pimpinan DPR RI setiap tahunnya, terdapat kenaikan aspirasi dan pengaduan masyarakat melalui aplikasi pengaduan masyarakat di	Upaya keterbukaan DPR tidak hanya melalui teknologi informasi atau daring, upaya lain juga dilakukan dengan membuka Layanan Informasi Publik	Hasil survei dari Lembaga Survei	Keterbukaan parlemen bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi atau yang disebut dengan parlemen, namun upaya lain yang bisa mendekatkan masyarakat dengan wakil rakyat secara langsung juga tetap perlu dilakukan.
--	---	--	----------------------------------	--

	<p>laman resmi DPR, yaitu 336 aspirasi/pengaduan masyarakat pada Tahun Sidang 2018-2019 menjadi 616 aspirasi/pengaduan masyarakat pada Tahun Sidang 2019-2020.</p> <p>Menurut Indra, ini berarti, secara umum persepsi masyarakat telah terbentuk bahwa penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada DPR dapat dilakukan dengan menggunakan kanal-kanal yang dimiliki DPR. Tidak ada lagi hambatan jarak dan waktu bagi masyarakat di dalam menyampaikan</p>			
--	--	--	--	--

	apa pun kepada wakil rakyatnya.			
--	---------------------------------	--	--	--

(Table 4.7)

#### 4.5. Faktor pendukung dan Penghambat Parlemen Modern

Faktor Pendukung :

1. Parlemen modern merupakan keputusan rencana strategis DPR yang diputuskan melalui rapat paripurna
2. Dukungan dari kesekjenan DPR
3. Dukungan perangkat teknologi

Faktor Pengambat :

1. Tidak semua anggota DPR mengoptimalkan fasilitas yang mendukung Parlemen Modern
2. Sinisme publik
3. Kondisi DPR yang dinamis

